BAB III

TINJAUAN PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya BAPPEDA

Pada tahun 1969 Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani masalah pembangunan di daerah yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA), badan ini di bentuk berdasarkan SK Gubernur No. 163 Tahun 1969, dan badan ini merupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten.

BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan SK. Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan selama dua tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK. Presiden No. 15 Tahun 1874, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku SK. Gubernur.

Kemudian dengan SK. Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK. Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK. Presiden No. 27 Tahun 1980,

yaitu : Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu. Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasaaarkan Perda No. 21 Tahun 1981, Perda No. 24 Tahun 1981.

Seiring dengan diberlakukannya pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang struktur pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah. BAPPEDA sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah juga menata kembali struktur organisasinya termasuk merubah nama BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BAPPEDA Kota Bandung. Hal ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi, untuk struktur organisasi ditetapkan dengan Perda Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

3.2. Kedudukan

BAPPEDA Kota Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II. BAPPEDA Kota Bandung merupakan Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

BAPPEDA Kota Bandung mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPEDA Tingkat I maupun BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

3.3 Tugas

- **BAPPEDA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.4. Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja

Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja yang dilakukan di BAPPEDA Kota Bandung, khususnya di Sub Bagian Data dan statistik yaitu untuk mengetahui data-data yang ada di kota Bandung baik itu data pembangunan maupun data Masyarakat serta berapa besar Pengeluaran dan pendapatan pada BAPPEDA Kota Bandung setiap akhir periode.

Kajian pelaksaan Kuliah Praktek Kerja ini adalah pada bidang Sistem Informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yaitu mengenai proses/prosedur yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan serta program-program kegiatan dan berapa besar dan yang tersedia dan yang akan di keluarkan untuk program-program tersebut yang di buat oleh BAPPEDA Kota Bandung.

3.4.1.Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang data & Statistik.

Bidang Data dan Satistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Data dan Statistik Pembangunan, Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas dan fungsi :

1. Melaksanakan dan Menyusun rencana pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan Pembangunan Daerah.
2. Melaksanakan pengolahan data dan penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik rencana pembangunan analisa penilaian pembangunan, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Mengevaluasi kegiatan pengolahan data dan penyusunan statistik untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
4. Melaksanakan pemantauan/ monitoring dan pengendalian kegiatan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah.

3.4.2.Tugas Kepala Bidang Data dan Statistik

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Data dan Statistik.
2. Merumuskan dan Mempersiapkan data dasar dan statistik sebagai bahan Penyusunan Anggaran.
3. Memantau dan Melaporkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.

4. Mempersiapkan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung sebagai bahan perencanaan berikutnya.
5. Membantu Kepala Bappeda dalam penyusunan LPJ Walikota.

Sub Bidang Data

Sub Bidang Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan Statistik di bidang pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Melaksanakan Tugas pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.
2. Mengumpulkan dan menyimpan data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Bandung.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan statistik di bidang penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyiapan dan penyusunan Database untuk kepentingan perencanaan
2. Merumuskan basis data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.
3. Menyusun dan memelihara data statistik Kota Bandung.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan statistik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sub Bidang Analisa Penilaian

Sub Bidang Analisa Penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan statistik di bidang analisis penilaian pembangunan , yaitu :

1. Menganalisa dan menilai terhadap data pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemda Kota Bandung.
2. Melaksanakan analisa penilaian terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.
3. Melaksanakan analisa dan evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan APBD, baik rutin maupun pembangunan.

4. Melaksanakan analisa dan penilaian terhadap usulan – usulan kegitan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah.

Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan statistik di bidang pelaporan rencana dan hasil pembangunan , yaitu :

1. Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Pemda Kota Bandung.
2. Menyusun LPJ Walikota Bandung.
3. Melaksanakan Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan organisasi, Instansi vertikal, Kecamatan/Kelurahan dan Lembaga lainnya dilingkungan Pemda Kota Bandung.
4. Menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian baik Triwulan maupun Tahunan.

3.5. Hasil Kerja Praktek

3.5.1 Gambaran Umum

Bappeda adalah suatu badan pemerintahan yang ada di kota bandung yang berfungsi sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada di kota bandung, Kota Bandung merupakan Kota yang sudah sangat maju , maka dari itu perlu tatanan mengenai segala hal baik itu tatanan kota , pariwisata dan segala bentuk pembangunan yang menyangkut kemajuan kota Bandung. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka Bappedalah yang mengatur semua itu, dan segala hal baik itu perencanaan pembangunan maupun hal lainnya maka Bappeda melakukan perencanaan sebelum melakukan pembangunan dan merinci berapa biaya yang akan di keluarkan untuk pembangunan tersebut berdasarkan berapa besar APBD yang tersedia yang setiap periodenya akan dibuat laporan sebagai pertanggung jawaban kepada Wali Kota Bandung. Dalam hal ini kami menggunakan program yang bisa melihat Data-data yang ada di kota Bandung baik itu Data pembangunan, lokasi dan biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan APBD yang tesedia.

Menyadari hal tersebut, kami selaku mahasiswa UNIKOM yang sedang melaksanakan KERJA PRAKTEK di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung mempelajari seberapa besar pemasukan dan berasal dari mana pemasukan dana tersebut dan untuk apa saja dana tersebut dikeluarkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibuatlah suatu program dengan menggunakan Microsoft Excel yang dapat memudahkan untuk membuat suatu laporan sebagai pertanggungjawaban yang akan dibuat setiap akhir periodenya, yang mana laporan tersebut akan kami lampirkan sebagai lampiran dan sebagai informasi mengenai berapa besar Anggaran dana yang tersedia,berasal

darimanakah dana tersebut dan berapa besar dana yang di keluarkan dan untuk apa dana tersebut di keluarkan. Untuk lebih jelasnya maka dapat anda lihat melalui rincian yang telah kami kerjakan selama kami melakukan kerja praktek sebagai berikut.

1.5.2. Alur Informasi APBD Tahun 2004

I. Pendapatan

Pendapatan di bagi menjadi tiga yaitu ***pendapatan asli daerah, dana Perimbangan, Dan Pendapatan Lain-lain.***

Pendapatan Asli daerah diambil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain pendapatan yang disahkan.

Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam, dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

II. Belanja

Belanja terdiri dari ***Belanja Aparatur,Belanja Administrasi Umum-Aparatur, Belanja Operasi Dan Pemeliharaan.***

Belanja Administrasi umum-Aparatur. Dana yang di Keluarkan untuk keperluan Benja Pegawai dan Personalia, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Lain-lain.

Belanja Operasi Dan Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pegawai dan Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal Aparatur terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal kendaraan, Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Koleksi Perpustakaan, Belanja Modal Alat-alat Berat, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan.

III. Pembiayaan

Pembiayaan itu terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah Berasal dari Transfer Dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Penyertaan Modal, Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi Daerah, Sisa Lebih Anggaran Penerimaan Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali piutang Pembiayaan.

Pengeluaran Daerah terdiri dari Transfer ke dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Yang jatuh tempo, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan, Pemberian Piutang Pada Pihak Lain.

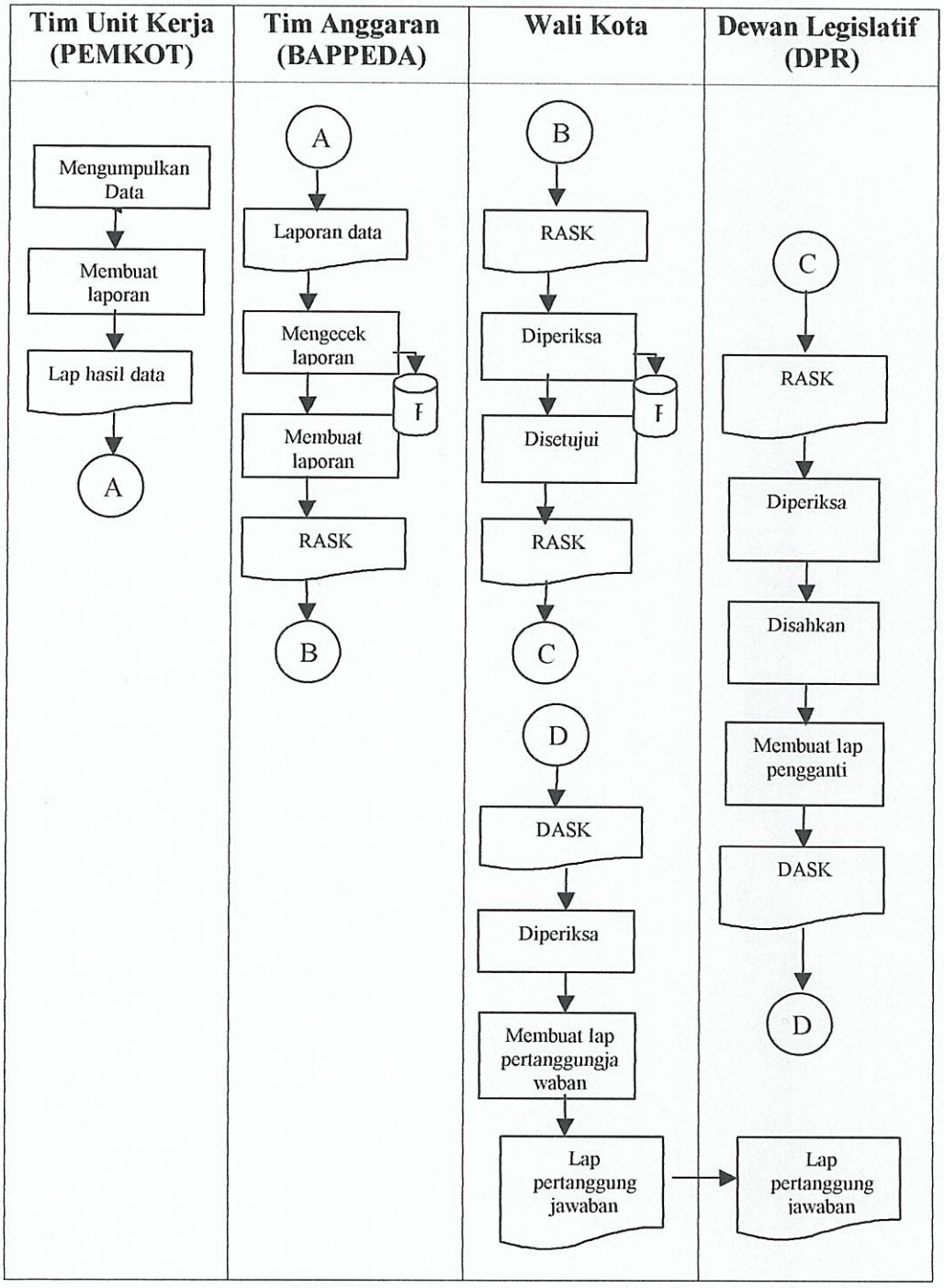
3.5.3. Deskriftif

Dalam mengumpulkan dana Pemda Kota membentuk suatu tim yang dinamai Tim Unit Kerja, Tim iini bertugas mengumpulkan data mengenai berapa besar dana yang di dapat dan di keluarkan setiap akhir periode.setelah data

dikumpulkan maka di susun dan di serahkan ke Dewan Eksekutif yang anggotanya bisa di ambil dari Pemda kota Maupun Bappeda, dan Tim ini dinamakan Tim Anggaran. Tim ini bertugas menyusun data yang telah di peroleh dan kemudian di simpan dan diproses setelah selesai maka dibuatlah suatu laporan dalam bentuk RASK dan kemudian di serahkan ke WaliKota sebagai hasil dari data pendapatan yang diperoleh selama akhir periode. Setelah selesai diperiksa di kantor WaliKota maka laporan yang masih dalam bentuk RASK tadi diserahkan ke Dewan Legislatif sebagai hasil pertanggungjawaban WaliKota terhadap DPR setelah disahkan maka laporan Dalam bentuk RASK tadi di ganti dengan DASK dan dikembalikan lagi ke WaliKota Sebagai hasil Anggaran pendapatan akhir tahun.

3.5.4. Flow Map

diagram alir Penyusunan dan Pengesahan Anggaran pendapatan daerah kota bandung



3.6. Desain Input / output

3.6.1. Desain Input

Merupakan rancangan yang digunakan untuk memasukan data-data pada program aplikasi yang mana kami menggunakan microsoft Excel, selain itu program aplikasi juga dapat dapat digunakan sebagai media antar muka(*interface)* untuk melakukan percetakan data-data.

3.6.2. Desain Output

Digunakan untuk mencetak data-data yang dapat di hasilkan dalam program Excel tadi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2004
1	**PENDAPATAN**	
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	209.923.789.420
1.1.1	Pajak daerah	123.072.415.850
1.1.2	Retrebusi daerah	60.403.415.850
1.1.3	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan	26.448.373.570
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	26.448.373.570
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	749.885.174.815
1.2.1	Bagi hasil pajak dan bukan pajak	174.340.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	434.500.000.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	6.500.000.000
1.2.4	Bagi hasil pajak dan bantuan dana dari propinsi	134.545.174.815
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	44.210.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.004.018.964.235**
II	**BELANJA**	
2.1	**BELANJA APARATUR**	**430.112.125.993**

2.1.1	**BELANJA ADMINISTRASI UMUM APARATUR**	**333.405.332.668**
2.1.1.01	Belanja pegawai dan personalia	219.604.805.162
2.1.1.02	Belanja barang dan jasa	55.000.958.262
2.1.1.03	Belanja perjalanan dinas	4.844.180.000
2.1.1.04	Belanja pemeliharaan	19.806.912.169
2.1.1.05	Belanja lain-lain	34.148.477.075
2.1.2	**BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (BELANJA NON INVESTASI)-APARATUR**	**49.905.377.083**
2.1.2.01	Belanja pegawai/personalia	15.003.669.040
2.1.2.02	Belanja barang dan jasa	27.018.478.883
2.1.2.03	Belanja perjalanan dinas	4.123.249.160
2.1.2.04	Belanja pemeliharaan	3.759.980.000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2004
2.1.3	**BELANJA MODAL APARATUR**	**46.801.416.242**
2.1.3.01	Belanja modal tanah	34.962.495.242
2.1.3.02	Belanja modal bangunan dan gedung	90.000.000
2.1.3.03	Belanja modal kendaraan	3.262.570.000
2.1.3.04	Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga	3.135.133.500
2.1.3.05	Belanja modal koleksi perpustakaan	77.600.000
2.1.3.06	Belanja modal alat-alat berat	
2.1.3.07	Belanja modal alat studio dan telematika	5.243.617.500
2.1.3.08	Belanja modal jaringan	30.000.000
2.1.3.09	Belanja modal barang bercorak kesenian dan budaya	
2.2	**Belanja public**	**460.587.672.361**
2.2.1	***Belanja administrasi umum dan public***	**364.597.735.727**
2.2.1.01	Belanja pegawai/personalia	327.438.885.312
2.2.1.02	Belanja barang dan jasa	26.130.774.415
2.2.1.03	Belanja perjalanan dinas	54.320.000
2.2.1.04	Belanja pemeliharaan	2.397.130.000
2.2.1.05	Belanja lain-lain	8.576.026.000
2.2.2	**Belanja operasi dan pemeliharaan**	**87.168.200.468**

2.2.2.01	Belanja pegawai/personalia	11.922.264.080
2.2.2.02	Belanja barang dan jasa	24.900.218.150
2.2.2.03	Belanja perjalanan dinas	1.115.008.600
2.2.2.04	Belanja pemeliharaan	36.535.222.125
2.2.2.05	Belanja stimulan	12.695.487.513
2.2.3	**Belanja modal public**	8.821.736.166
2.2.3.01	Belanja modal tanah	
2.2.3.02	Belanja modal bangunan dan gedung	4.238.880.166
2.2.3.03	Belanja modal kendaraan	45.000.000
2.2.3.04	Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga	961.488.520
2.2.3.05	Belanja modal koleksi perpustakaan	
2.2.3.06	Belanja modal jalan dan jembatan	1.110.173.200
2.2.3.07	Belanja modal bangunan air(irigasi)	
2.2.3.08	Belanja modal jaringan	
2.2.3.09	Belanja modal monument,tugu,bangunan	
KODE REKENING	**URAIAN**	**ANGGARAN TAHUN 2004**
2.2.3.10	Belanja modal alat-alat kedokteran dan kesehatan	1.620.690.000
2.2.3.11	Belanja modal penerangan jalan umum,traffic light dan rambu lalu lintas	842.504.446
2. 3	**BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**	**94.544.086.200**
2. 4	**BELANJA TIDAK TERSANGKA**	**1.000.000.000**
	JUMLAH PEMBELANJAAN	**986.243.884.554**
	SULFUR (DEFISIT)	**17.775.079.681**
III	**PEMBIAYAAN**	**17.775.079.681**
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**30.224.920.319**
3.1.1	Transfer dari dana cadangan	
3.1.2	Hasil penjualan penyertaan modal	
3.1.3	Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah	20.000.000.000
3.1.4	Sisa lebih penerimaan anggaran tahun lalu	10.224.920.319
3.1.5	Penerimaan kembali piutang pembiayaan	
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**48.000.000.000**
3.2.1	Transfer kedana cadangan	

3.2.2	Penyenaan modal	
3.2.3	Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo	48.000.000.000
3.2.4	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan	
3.2.5	Pemberian piutang pada pihak lain	

